



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

SEJARAH INDONESIA



KELAS
XII



**KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA
INDONESIA
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
SEJARAH INDONESIA KELAS XII**

**PENYUSUN
MARIANA, M.Pd
SMAN 10 BEKASI**

DAFTAR ISI

PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
GLOSARIUM	v
PETA KONSEP	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. Identitas Modul	1
B. Kompetensi Dasar	1
C. Deskripsi Singkat Materi	1
D. Petunjuk Penggunaan Modul	2
E. Materi Pembelajaran	2
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1.....	3
DEMOKRASI TERPIMPIN.....	3
A. Tujuan Pembelajaran	3
B. Uraian Materi	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Dekrit Presiden 1959.....	5
C. Rangkuman	7
D. Latihan Soal	8
E. Penilaian Diri	10
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2.....	11
KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI.....	11
A. Tujuan Pembelajaran	12
B. Uraian Materi	12
1. Kehidupan Politik.....	13
A. Pembebasan Irian Barat.....	13
B. Konfrontasi Malaysia.....	16
C. Politik Mercusuar	18
2. Kehidupan Ekonomi	19
A. Membentuk Dewan Perancang Nasional.....	19
B. Sanering/Devaluasi	20
C. Menekan Laju Inflasi	20
D. Deklarasi Ekonomi (Dekon)	20
E. Dana Revolusi.....	21
C. Rangkuman	21

D. Penugasan Mandiri.....	22
E. LATIHAN SOAL	22
F. Penilaian Diri	24
EVALUASI.....	26
DAFTAR PUSTAKA	30

GLOSARIUM

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

Keputusan atau ketetapan presiden Soekarno terkait dengan kondisi politik yang tidak stabil akibat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru. Dekrit ini berisi 1. Pembubaran Dewan Konstituante, 2. Kembali ke UUD 45 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950 , 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dwikora :

Dwi Komando Rakyat yaitu komando presiden Soekarno untuk melakukan konfrontasi kepada malaysia yang diucapkan pada tanggal 3 Mei 1964 yaitu 1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia, 2. Bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah Serawak dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Dokumen Gilchrist:

Dokumen atau catatan yang dibuat Gilchrist duta besar Inggris pada tahun 1960an. Dokumen ini yang dijadikan alasan PKI menuduh AD akan melakukan kudeta terhadap Soekarno

GANEF0 :

Games Of The Emerging Forces merupakan Salah satu proyek mercusuar presiden Soekarno untuk menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara New Emerging Forces (NEFOS)

Konfrontasi :

Cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung atau terang-terangan. Misalnya konfrontasi Indonesia dengan malaysia.

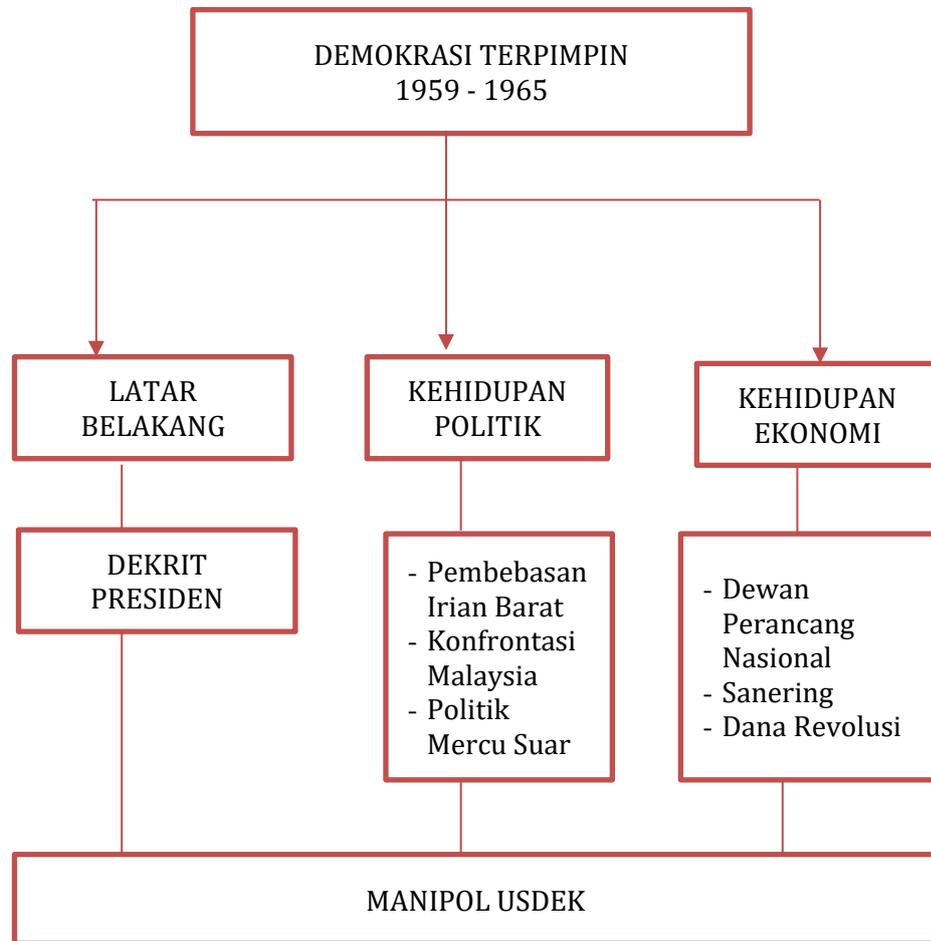
Konsepsi Presiden 1957:

Konsepsi presiden Soekarno yang bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya terdiri atas 4 partai pemenang dan dibentuknya dewan Nasional.

Nawaksara :

Judul pidato presiden Soekarno pada 22 Juni 1966, menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti sembilan dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato ini berisikan sembilan pokok persoalan yang dianggap penting , oleh presiden Soekarno selaku mandtaris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September 1965.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: Sejarah Indonesia
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 4 X 45 Menit
Judul Modul	: Kehidupan Politik Dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

B. Kompetensi Dasar

3.4	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin
4.4	Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam Bentuk laporan tertulis

C. Deskripsi Singkat Materi

“Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri....”



Kutipan diatas merupakan pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstituante Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950. Harapan Bung Karno bahwa UUD yang baru terbentuk nanti memuat nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mencoba mengusulkan pemikirannya melalui Konsepsi Presiden 1957 yang merupakan gagasan pembaharuan kehidupan politik dengan system Demokrasi Terpimpin sebagai upaya penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa sistem Demokrasi Terpimpin merupakan jawaban terhadap kegagalan sistem Demokrasi Liberal yang memunculkan pergolakan, pembangkangan, dan instabilitas politik. Bagaimanakah penerapan sistem Demokrasi Terpimpin? Apakah Demokrasi Terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sesuai dengan harapan Bung karno? Yuk baca lagi kelanjutannya nanti kamu akan temukan jawabnya.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

-  BACALAH MODUL INI HINGGA TUNTAS DAN PAHAM
-  IKUTI PETUNJUK KEGIATAN BELAJAR YANG ADA PADA MODUL
-  CEK PEMAHAMANMU MELALUI KEGIATAN EVALUASI
-  BELAJARLAH SECARA MANDIRI JIKA MEMERLUKAN BANTUAN HUBUNGI GURU
-  JANGAN MELIHAT KUNCI JAWABAN SEBELUM MENGERJAKAN EVALUASI
-  COCOKAN HASIL PEKERJAANMU DENGAN KUNCI JAWABAN YANG ADA
-  JIKA NILAIMU MASIH KURANG , BELAJARLAH LAGI PEMAHAMAN TENTANG MATERI TERSEBUT

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, tugas mandiri, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Latar Belakang munculnya Demokrasi Terpimpin

Kedua : Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat:

1. Menjelaskan latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin
2. Menguraikan Kebijakan yang muncul saat diberlakukannya Demokrasi Terpimpin

B. Uraian Materi

Anak anak hebat Indonesia, tahukah kalian mengapa muncul ide “Demokrasi Terpimpin” ?

Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam Pemilu 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, dihadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet.



Lebih jauh Presiden Soekarno menekankan bahwa Demokrasi Liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggantikan dengan suatu demokrasi yang sesuai kepribadian Bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi presiden 1957 sebagai berikut:

1. Pemberlakukan sistem Demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki struktur politik bangsa Indonesia.
2. Pembentukan Kabinet Gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya.

1. Latar Belakang

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai

langkah pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai landasan Demokrasi Terpimpin. Usulan Nasution kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan UUDS 1950.

Atas Desakan Nasution akhirnya presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19 Februari tentang pelaksanaan Demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR Pada 2 maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan



konstituante, maka dalam sidang konstitusi tanggal 22 April 1959 presiden Soekarno meminta konstitante menetapkan kembali UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai konstitusi Negara yang tetap. Usulan presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi Negara. Usulan presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi Negara. Pada 3 Juni 1959 sidang dewan konstituante memasuki masa reses dimana beberapa fraksi dalam dewan konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting, konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat didalamnya ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI.

Untuk mencegah munculnya ekses ekses politik sebagai akibat ditolakny usulan pemerintah kembali ke UUD 45 oleh dewan konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. KSAD dan ketua Umum PNI, Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembli berlakunya UUD 45 dengan suatu Dekrit Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, dan anggota Dewan nasional (Roeslan Abdoel Gani, dan Muh. Yamin), serta ketua Makamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro untuk menyepakati diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Negara tanpa persetujuan konstituante. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu:

1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era demokrasi Terpimpin.

2. Dekrit Presiden 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosila politik. Dekret juga didukung oleh TNI dan dua partai besar, PNI dan PKI serta mahkamah Agung. bahkan KSAD, salah satu konseptor Dekrit, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden. Dukungan lain kemudian datang Dari DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus dibawah naungan UUD 45. Melalui Dekrit Presiden, Konsep Demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui *Staatnoodrecht*, hukum negara dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret presiden 5 Juli 1959, perdana menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan kabinet karya pun dibubarkan.



Tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk cabinet baru yang dinamakan kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet kerja terdiri dari Sembilan menteri dan 24 menteri muda sedangkan KSAD, angkatan Udara, Angkatan laut, Kepolisian, dan jaksa Agung diangkat sebagai menteri Negara *ex officio*. Untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik sehingga untuk memberikan tekanan pada sifat nonpartai, beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio (PNI) dan J. Leimena (Partai Kristen Indonesia).



Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Kabinet kerja terdiri atas lembaga Yudikatif, jaksa Agung, Ketua mahkamah Agung, serta lembaga yang meliputi wakil ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sehingga seorang pejabat dapat memegang jabatan pada dua bidang pemerintahan yang berbeda yaitu memegang jabatan lembaga legislatif atau yudikatif dengan status eksekutif. Sistem ini meninggalkan konsep *Trias politica* sekaligus menyipang dari prinsip-prinsip demokrasi. Langkah ini mendapat tentangan dari tokoh-tokoh partai politik tetapi tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno. Pembentukan kabinet kemudian diikuti Pembentukan dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua.

DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaran untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Soekarno dalam mengenalkan Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-kapitalisme, anti demokrasi Liberal, dan perubahan secara total. Pidato ini berjudul "penemuan Kembali Revolusi Kita". DPAS menetapkan pidato Presiden Soekarno menjadi GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia

yang disingkat Manipol. 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang dilandasi oleh penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 dibawah pimpinan Charul Saleh. Anggota MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Pengangkatan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota MPR dipilih melalui Pemilu. Tokoh-tokoh yang diangkat sebagai anggota MPRS harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Setuju kembali ke UUD 1945
2. Setia pada perjuangan Bangsa Indonesia
3. Setuju dengan Manipol.

Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno Nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan GBHN. Semetara itu, untuk DPR hasil pemilu 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landdasan UUD 45 dengan syaratmenyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan Penetapan Presiden No. 1/1959. Pada awalnya DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno, hal ini ketika secara aklamasi dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekret Presiden 1959. Akan tetapi benih konflik mulai timbul ketika Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden untuk meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono menyakinkan bahwa mandat tersebut pasti akan diberikan, namun presiden Soekarno menolak, ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini presiden tidak mau terikat dengan DPR.

Konflik terbuka antara presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR pada tanggal 5 maret 1960 oleh Presiden. Presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR GR). Para anggota yang ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik, dan golongan Fungsional. Sehingga dalam DPR-GR terdiri atas dua kelompok besar yaitu wakil partai dan golongan fungsional (karya) dengan perbandingan 130 wakil partai dan 153 golongan fungsional. Pelantikan DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok pelaksanaan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Kedudukan DPR-GR adalah pembantu Presiden/Mandataris MPR dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan MPR. Pembubaran DPR hasil Pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI yang mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR-GR. Akan tetapi sikap ini berubah setelah jatuhnya kursi NU dalam DPRGR ditambah. Namun K.H. Wahab Chasbulla, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI.

Tokoh PNI yaitu Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada, bahkan Iskaq menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk dalam DPR-GR bukanlah wakil PNI, sebab mereka adalah hasil dari penunjukkan. Sikap tokoh partai yang menolak DPR-GR bergabung dalam kelompok Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai

NU, Masyumi, Partai katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII danbeberap panglima daerah yang memberikan dukungan. Liga Demokrasi mengusulkan untuk penangguhann DPR-GR. Liga ini kemudian dibubarkan oleh Presiden.

Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah membentuk Front Nasional yaitu organisasi masa yang bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Lembaga baru ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 tahun 1959. Front ini diketuai oleh PResiden Soekarno. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan Ketetapan Presiden no 94 tahun1962 tentang penginterasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi dengan eksekutif.

MPRS, DPR-GR, DPA, mahkamah Agung, dan dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden . Proses integrasi lembaga-lembaga Negara menyebabkan kedudukan pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan berhak ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijaka pemerintah pada lembaganya masingmasing. Selain itu presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPRS) berdasarkan ketetapan Presiden NO. 4/1962. MPPRS merupakan badan pembantu pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi.

Keanggotan MPPRS meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin datang pertama kali dari M. Hatta, melalui tulisannya dalam majalah Islam "Panji Masyarakat" pada tahun 1960 yang berjudul "Demokrasi Kita". hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan presiden, tugas DPR sampai pada pengamatan adanya "Krisis Demokrasi", yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator.

C. Rangkuman

Dekret Presiden Republik Indonesia mempunyai berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, tindakan tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Kedua, berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan oleh partai politik. Peranan parlemen perlahan beralih ketangan Presiden Sukarno. Melalui konsep demokrasi terpimpinnya ia mencela demokrasi barat yang liberalistik yang menyebabkan ketidak stabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu Sukarno ingin mengembalikan kewenangannya sebagai Presiden (dalam sistem presidensil) yang tak didapati dalam masa demokrasi parlementer.



Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, Sukarno menguarakan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikanUSDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi

Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh Sukarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka MPRS yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan Manipol USDEK sebagai GBHN dan wajib diperkenalkan disegala tingkat pendidikan dan pemerintahan, selain itu pers pun diharuskan mendukungnya.

Sebenarnya hanya disebagian masyarakat politik saja Manipol-USDEK diterima sepenuh hati, sedangkan disebagian yang lain menaruh kecurigaan dan kekhawatiran. Manipol-USDEK itu sendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula suatu upaya untuk menyelaraskan semua pola penting dari orientasi politik yang ada di Indonesia.

Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan perbedaan besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewiraswastaan Islam. Pada pelaksanaannya, Manipol-USDEK tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah maka pelaksanaan manipol Usdek dapat disimpulkan dilakukan dengan paksaan.

Pandangan negatif Soekarno terhadap sistem liberal pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang



D. Latihan Soal

1. Kabinet yang terbentuk setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah:
 - A. Kabinet Karya
 - B. Kabinet Kerja
 - C. Zaken Kabinet
 - D. Kabinet Gotong Royong
 - E. Kabinet Dwikora

2. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya pemerintahan orde lama salah satunya didorong oleh faktor.....
 - A. keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan
 - B. kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru
 - C. ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal
 - D. keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan
 - E. tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17

3. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya:
 - A. Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960
 - B. pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
 - C. pembentukan Front nasional
 - D. Dekrit presiden 5 Juli 1959
 - E. pembentukan kabinet kerja

4. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah:
 - A. membentuk Dewan Nasional
 - B. membubarkan Dewan Konstituante
 - C. meminta dukungan Angkatan Darat
 - D. membentuk Kabinet Gotong Royong
 - E. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

5. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belum selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu:
 - A. "Nawakarsa"
 - B. "Indonesia Menggugat"
 - C. "Jalannya Revolusi Kita"
 - D. "*To Build The World a New*"
 - E. "Penemuan Kembali Revolusi Kita"

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

1. Kunci : B

Pembahasan

Tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk cabinet baru yang dinamakan kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio.

2. Kunci Jawaban : B

Hingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi Negara. Pada 3 Juni 1959 sidang dewan konstituante memasuki masa reses dimana beberapa fraksi dalam dewan konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali UUD 1945. Atas Desakan Nasution akhirnya presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 45.

3. Kunci Jawaban : C

Pembahasan :

DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus dibawah naungan UUD 45. Melalui Dekret Presiden, Konsep Demokrasi dipimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui *Staatnoodrecht*, hukum negara dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret presiden 5 Juli 1959, perdana menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan kabinet karya pun dibubarkan.

4. Kunci jawaban : A

Pembahasan :

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957.

5. Kunci Jawaban : E

Pembahasan :

17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Soekarno dalam mengenalkan Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-kapitalisme, anti demokrasi Liberal, dan perubahan secara total. Pidato ini berjudul "penemuan Kembali Revolusi Kita".

E. Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

NO	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah kamu dapat menjelaskan latar belakang munculnya ide dari Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin?		
2	Apakah kamu dapat menyebutkan isi dari Dekrit Presiden 1959?		
3	Apakah kamu dapat menceritakan secara singkat apa yang terjadi pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959?		
4	Apakah kamu dapat menceritakan bagaimana pandangan Moh.Hatta terhadap Demokrasi Terpimpin yang ditetapkan oleh Soekarno?		

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kamu dapat menjelaskan yang berkaitan dengan Demokrasi terpimpin antara lain tentang:

1. Kehidupan Politik
2. Kehidupan Ekonomi

B. Uraian Materi

Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI disampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manifesto Politik / Manipol USDEK meliputi, UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK menjadi ideologi resmi sekaligus haluan Negara. Sejak tahun 1961 Manipol-USDEK menjadi salah satu mata kuliah wajib yang tercakup dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi). Beberapa surat kabar yang pro masyumi dan PSI menolak ide tersebut. Kedua surat kabar tersebut dilarang terbit oleh pemerintah.

Pada masa Demokrasi terpimpin peran partai politik dibatasi oleh pemerintah. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan penetapan Presiden no 7 tahun 1959 tentang syarat syarat penyederhanaan partai yang isinya sebagai berikut:

1. Menerima dan membela konstitusi 1945 dan pancasila
2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya
3. Partai politik setidaknya harus memiliki cabang disepuluh wilayah Indonesia
4. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai
5. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan.

Hingga tahun 1961 hanya ada Sembilan partai politik yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Melalui keputusan presiden Nomor 128 tahun 1961 partai-partai yang diakui antara lain PKI, Partai Murba, Partai katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti dan partindo. Dalam perkembangannya hubungan Presiden Soekarno dan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis.

Beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga pecah konflik antara Presiden dengan DPR. Konflik memuncak saat DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni 1960. Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan menegaskan bahwa seluruh anggota DPR terikat aturan yang ditetapkan presiden.

Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.

Sosialisasi Resopim mengakibatkan kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi Negara ditetapkan dibawah presiden. Pada 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno mendapat dukungan tiga kekuatan besar yaitu komunis, agama dan nasionalis. Sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis. Presiden Soekarno juga mengeluarkan ajaran nasionalis, agama dan komunis (nasakom).

Bagi Presiden Sekarno, Nasakom merupakan cermin paham berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom. Ajaran Nasakom mulai disebarakan kepada masyarakat dan pencetus ajaran Nasakom diannggapsama dengan upaya memperkuat kedudukan preseden karena jika menolak ajaran nasakom berarti menolak kebijakan presiden. Dalam perkembangannya, PKI memanfaatkan ajaran Nasakom dengan sebaik-baiknya. D.N. Aidit sebagai ketua PKI kemudian berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI, yang berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno.

Menurut ketua PKI, D.N. Aidit, strategi tersebut menguntungkan bagi eksistensi PKI. Selain itu melaksanakan Manipol secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan program PKI. PKI berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia melalui Nasakom. Strategi ini pula yang berhasil menyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Bahkan, saat presiden Soekarno membubarkan beberapa partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, PKI berhasil terhindar dari kebijakan pembubaran tersebut. Presiden Soekarno pun seolah tidak peduli dengan penolakan PKI dalam kabinet bahkan tetap memberikan porsi cabinet kepada PKI.

Setelah berhasil mendekati presiden Soekarno, PKI berusaha mencari dukungan politik dari masyarakat. Melihat kedekatan PKI dan Presiden Soekarno, Angkatan Darat tidak tinggal diam. AD mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Pimpinan AD kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap D.N. Aidit dan melarang diterbitkan surat kabar harian Rakyat. Tidanakan ini mendapat protes dari presiden Soekarno dan memerintahkan agar segala keputusan AD dicabut kembali. Dalam sebuah sidang di Istana Negara, AD mengingatkan presiden Soekarno agar tidak terlampau percaya atas kelayalan PKI. Peringatan tersebut tidak dihiraukan presiden Soekarno dan tetap pada kebijakan melarang AD mengambil tindakan terhadap PKI.

Memasuki tahun 1964 serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa surat kabar yang berseberangan dengan PKI memberitakan penemuan dokumen rahasia PKI yang berisikan rencana perebutan kekuasaan. Akan tetapi pemberitaan tersebut dibantah oleh D.N. Aidit. Peristiwa tersebut berkembang menjadi isu politik besar pada 1964 Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan mengumpulkan seluruh pemimpin partai politik. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemimpin partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah sedang berkonfrontasi dengan Malaysia

1. Kehidupan Politik

A. Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu program dalam setiap kerja wajib kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal. Upaya tersebut terus

berlanjut dan menjadi salah satu agenda utama pemerintah pada masa Demokrasi terpimpin.

a. Latar Belakang masalah Irian barat

Keputusan KMB menetapkan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut mengecewakan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian barat kembali menjadi bagian NKRI dan Indonesia tidak akan mundur sejenak pun dari Irian barat. Dalam sidang umum PBB



1961, Subandrio menegaskan bahwa Indonesia akan melaksanakan konfrontasi di segala bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan militer.

b. Perjuangan pembebasan Irian Barat

Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat melalui empat cara, yaitu, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, konfrontasi militer dan diplomasi.

1. Perjuangan Diplomasi

Perjuangan dilakukan secara bilateral, namun gagal Indonesia membawa masalah Irian Barat ke dalam forum internasional melalui konferensi Colombo April 1954, dan Konferensi Asia Afrika April 1955 dengan mengirim beberapa diplomat yaitu Subandrio, Mukarto, Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono dan Alex Alatas. Dalam dua konferensi ini, Indonesia berhasil mendapat dukungan dari Negara-negara peserta Konferensi. Indonesia mengajukan masalah Irian barat dalam sidang Umum PBB periode 1954-1957, akan tetapi upaya tersebut gagal karena Indonesia tidak mendapat dukungan dua pertiga anggota sidang.

2. Konfrontasi Politik

Pada 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU no 13 tahun 1956. Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo mengesahkan kekuasaannya atas Irian barat dengan membentuk pemerintahan sementara Irian barat di Soasiu, Tidore.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan sementara ini adalah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian barat sebagai bagian dari republic Indonesia dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (bangsawan tidore) 10 Februari 1958 pemerintah membentuk front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada 17 Agustus 1960 pemerintah secara resmi memutuskan hubungan diplomatic dengan Kerajaan Belanda yang ditandai dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia dan pemanggilan Duta Besar Indonesia untuk Belanda.

3. Konfrontasi Militer

Pemerintah Indonesia berencana membeli senjata dari AS namun dialihkan ke negara-negara blok Timur, terutama Uni Soviet. Upaya pembelian senjata dipimpin Jenderal A.H. Nasution (Menteri keamanan nasional). Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikor) di Yogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikor diharapkan agar rakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.

Isi Trikora yaitu:

1. Gagalakan pembentukan Negara boneka Papua Belanda
2. Kibarkan sang Merah putih di Irian Barat
3. Tanah Air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

13 januari 1962 pemerintah membentuk komando mandala Pembebasan Irian Barat yang berbarkas di Makasar dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Mayor Jenderal Soeharto menyusun strategi pembebasan Irian barat dengan operasi militer yang dijalankan oleh TNI. Operasi tersebut yaitu Operasi Benteng Ketaton di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan, Operasi Jatayu di Sorong, kaimana, dan Merauke serta Operasi Jaya Wijaya dengan target utama kota Hollandia (Jayapura). Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Luat Aru antara kapal jenis motor torpedo boat ALRI dan dua kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran ini Komodor Yos Sudarso dan kapten Wiratno gugur.

4. Konfrontasi Ekonomi



Pembatalan Utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia mulai tanggal 5 Desember 1957. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 23 tahun 1958 meliputi perusahaan penerbangan komersial Belanda (KLM) dan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). Pemerintah Indonesia memindahkan pasar komoditas Indonesia dari Rotterdam (pelabuhan utama Belanda)

ke Bremen (Jerman) sehingga Belanda yang menjadi penyalur komoditas Indonesia untuk dipasarkan di Eropa pun terkena dampak secara ekonomis.

c. Persetujuan New York

Sekretaris Jenderal PBB, U Thant meminta kesediaan diplomat dari AS, Ellsworth Bunker menjadi penengah perundingan antara Indonesia-Belanda. Ellsworth Bunker mengusulkan agar:

- ❖ Belanda menyerahkan Irian barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dalam jangka waktu dua tahun.
- ❖ Rakyat Irian barat diberikan kesempatan menentukan pendapatnya supaya tetap berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.

Pada 14 Agustus 1962 Indonesia mengadakan perundingan di Virginia, Amerika Serikat dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Adapun Ellsworth Bunker, menjadi penengah perundingan. Perundingan menghasilkan kesepakatan yang disebut persetujuan New York. Salah satu isi persetujuan yaitu Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) selambatnya pada 1 Oktober 1962. Pemerintah sementara PBB



menggunakan tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra putri Irian Barat. Pada 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB. Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah penyerahan Irian Barat pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

d. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat



Pepera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1969 – 4 Agustus 1969 yang diawasi langsung oleh PBB. Pepera dilaksanakan di setiap kabupaten yang semula menghendaki Pepera dilakukan semua orang dewasa baik pria maupun wanita. Dengan sistem *one men one vote* sesuai praktek internasional. Namun Indonesia menginginkan Pepera dilaksanakan dengan metode *many men one vote*. Metode ini lebih sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia yaitu musyawarah mufakat atas dasar Pancasila. Perwakilan PBB yang mengawasi jalannya Pepera selanjutnya membawa hasil Pepera dalam sidang umum ke-24 PBB pada November 1969. Dengan suara bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 sekaligus menyetujui hasil Pepera tersebut.

B. Konfrontasi Malaysia

Pada masa demokrasi Terpimpin, kondisi pencaturan politik dunia didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara tersebut memiliki sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Kedua Negara tersebut membangun sekutu mereka sendiri yang kemudian dikenal dengan nama blok Barat dan blok Timur. Pemerintah Indonesia menolak mengikat diri kepada salah satu blok karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri yang disebut politik luar negeri bebas aktif. Meskipun demikian, arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin ditentukan oleh Presiden Soekarno.

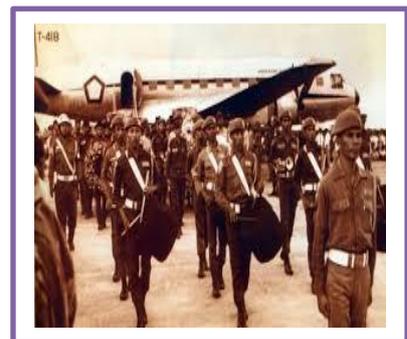
Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yaitu konfrontasi terhadap Malaysia Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Gagasan tersebut mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara karena menganggap secara historis Sabah merupakan milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara.

Pembentukan Federasi dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Konferensi Maphilindo (Mamaysia, Philipina dan Malaysia) di Filipina pada tanggal 31 Juli-5 Agustus 1963 merupakan upaya untuk meredakan ketenggangan diantara tiga Negara tersebut secara damai. Konferensi menghasilkan tiga dokumen penting yaitu Deklarasi Manila, persekutuan Manila dan Komunike Bersama.

Inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara setuju. Pembentukan Konferensi Malaysia disetujui oleh ketiga Negara untuk meminta sekjen PBB melakukan pendekatan terhadap persoalan sehingga diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia.

Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidikan. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim ini memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamkan pada tanggal 16 September 1963. Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai bentuk pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak Rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan.

Aksi-aksi demokrasi menentang pembentukan Federasi Malaysia di Jakarta di balas pula dengan aksi-aksi demokrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatic Indonesia Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serwak dan Sabah.



Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara menarik perhatian beberapa Negara seperti AS, Jepang dan Thailand dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Namun masalah pokok sengketa tidak terpecahkan karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga Negara. Upaya lainnya, Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri di Bangkok.

Namun sampai dua kali pertemuan, tidak menghasilkan satu keputusan positif sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Ditengah kemacetan diplomasi,

pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di hadapan apel besar sukarelawan yang isinya:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantuan perjuangan revolusioner rakyat- rakyat Manila, Singapura, Sarawak, Sabah dan berunai untuk membubarkan Negara boneka Malaysia.

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964.

Ditengah berlangsungnya Konfrontasi, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia tersebut. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964 yang dengan tegas dan sepotan menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai.

C. Politik Mercusuar

Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja Negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan Negara yang memadai. penyebab pembengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek Mercusuar yang lebih bersifat politis dari pada ekonomi. Politik mercusuar adalah politik untuk mencari kemegahan/keindahan dalam pergaulan antara bangsa di dunia. Politik mercusuar digalakan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan Negara-negara Nefo.



Selain mendirikan bangunan megah yang menghabiskan biaya milyaran rupiah, politik mercusuar diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games IV dan Games Of The New Emerging Force (Ganefo), yaitu pesta olahraga Negara-negara Nefo pada 1963. Proyek-proyek mercusuar ini meliputi pembangunan Monumen Nasional (monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks Olahraga Senayan. Jembatan Ampera juga merupakan salah satu dari proyek mercusuar. Pada awal pembangunannya jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno. Dalam perkembangannya, nama jembatan tersebut diganti menjadi Jembatan Ampera yang merupakan akronim dari amanat penderitaan rakyat (Ampera). Kini, jembatan Ampera menjadi ikon kota Palembang dan Provinsi Sumatra Selatan.

2. Kehidupan Ekonomi

Pada dasarnya sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian negara. Pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi sehingga pengaturan ekonomi melalui sistem komando semakin menonjol. Masalah kepemilikan aset nasional oleh Negara dan fungsi sosial-politik ditempatkan sebagai masalah strategi nasional. Pengambil alihan aset-aset milik pengusaha asing terutama Belanda ditargetkan oleh pemerintah mampu menasionalisasikan 80%. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah hanya mampu menasionalisasikan sekitar 20% perusahaan asing. Hal ini disebabkan para pemilik modal sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Dengan demikian kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan.

Sistem ekonomi terpimpin juga dilaksanakan dalam bentuk program pembangunan nasional semesta berencana. Dalam mendukung ide ini yang dicanangkan oleh presiden Soekarno, pemerintah berusaha memaksimalkan peran badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meningkatkan peranan koperasi. Salah satu koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani (koperta). Peranan koperta sama dengan perusahaan Negara sebagai alat ekonomi terpimpin. Pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Desember 1959 yang berisikan ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke koperasi agar dapat menggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh pengusaha Tionghoa.

Pengusaha swasta diorganisasikan sesuai bidangnya masing-masing yang dikenal dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) dan Gabungan perusahaan Sejenis (GPS). OPS dan GBP bertugas mengalokasikan bahan baku, perundingan, kontrak-kontra perburuhan, dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi. Dalam perkembangannya pemerintah juga membentuk badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional (Bamunas) pada 10 Feb 1964 yang diatur dalam Peraturan presiden Nomor 2 tahun 1964. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa bamunas bertugas membimbing dan menggerakkan pengusaha swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional.

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

Permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh kekacauan kondisi politik dari ekonomi sebelum tahun 1959 yaitu inflasi. Beberapa upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai berikut:

A. Membentuk Dewan Perancang Nasional

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional (Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun 1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1963 Deparnas diganti menjadi badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan ini dipimpin langsung oleh presiden Soekarno.



Bappenas memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah
2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan
3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Hingga saat ini Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas merencanakan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

B. Sanering/Devaluasi

Mata uang rupiah Pada 25 Agustus 1959 pemerintah menetapkan kebijakan sanering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang Rp 1.000 dan Rp. 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi Rp. 100 dan Rp 50. Mata uang pecahan seratus kebawah tidak didevaluasi. Kebijakan Devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindaklanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan.

C. Menekan Laju Inflasi

Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Pengganti UU no 2 tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian Negara. Pemerintah juga memberlakukan Kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya diatas Rp. 25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan Negara. Dengan kebijakan moneter tersebut pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemandirian moneter dengan menghilangkan likuiditas dalam masyarakat.

D. Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia Tiga belas. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota Mus. Dua tokoh terkemuka yang bergabung dalam Panitia Tiga Belas adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), anggota DPR, dan anggota DPA. Dua tokoh terkemuka yang bergabung dalam Panitia Tiga Belas D.N. Aidit (PKI) dan Ali Sastroamidjojo (PNI). Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Presiden Soekarno meresmikan Dekon pada 28 maret 1963 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme
2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Pada dasarnya Dekon memperhatikan berbagai prioritas seperti mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor.

Dekon disusul dengan empat belas peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama 26 Mei. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Indonesia adalah berdikari yaitu berdiri di kaki sendiri. Pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik PKI. PKI bersedia melaksanakan Dekon selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan orang-orang PKI. Peraturan 26 Mei yang diterapkan dalam deklarasi Ekonomi mendapat kritik dari PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis. PKI juga berpendapat bahwa penerapan peraturan 26 Mei akan berdampak pada kenaikan tarif listrik dan angkutan umum.

Pada perkembangannya, presiden Soekarno menunda pelaksanaan peraturan 26 Mei karena sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Dalam perkembangannya, kebijakan Deklarasi Ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia yang semakin merosot. Ketidak berhasilan kebijakan tersebut disebabkan pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari internasional Monetary Fund (IMF). Situasi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan politik bangsa Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan negara-negara barat dan Malaysia.

E. Dana Revolusi

Pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi presiden no 018 tahun 1964 dan keputusan Presiden No 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi. Selanjutnya, presiden Soekarno menunjuk Menteri urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam untuk mengelola Dana Revolusi. Adapun ketentuan-ketentuan penggunaan dana devisa yaitu:

1. Dana Revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka Panjang (deferred payment).
2. Adanya pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah.
3. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai jumlah yang ditetapkan
4. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden dikenal dengan proyek mercusuar. Proyek ini bersifat pretise politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.

Akibat dari kebijakan Dana revolusi yaitu:

1. Utang-utang negara semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin menurun
2. Adanya kekacauan dibidang keuangann Negara akibat pemberian fasilitas alokasi kredit kepada perseorangan atau kepada perusahaan yang bukan sektor produksi dengan bunga tertentu.
3. Tingkat inflasi menunjukan kenaikan yang semakin tidak terkendali dimana pada 1959 tingkat inflasi hanya 19,24% meningkat hingga mencapai 635,35% pada 1966. Nilai positif yang dapat ditiru dari teladan para tokoh-tokoh bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin adalah sikap peduli dan proaktif. Sikap peduli dan proaktif para menteri dan ahli ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukan dengan kesediaan mereka menciptakan gagasan inovatif sebagai upaya menciptakan stabilitasi perekonomian Indonesia.

C. Rangkuman

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan Politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada Masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trihora). Selain itu konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora). Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks Olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.

D. Penugasan Mandiri

Setelah kalian mempelajari materi pada Kegiatan 1 dan 2 tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, maka untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi tersebut buatlah Essay tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan ketentuan sebagai berikut :

Essay tentang perkembangan politik ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terdiri dari 7 Paragraf.

Paragraf pertama :

Menguraikan latar belakang / tujuan penulisan essay tentang perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

Paragraf ke dua :

Menguraikan awal terbentuknya pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Paragraf ke tiga : Menganalisis perkembangan kehidupan politik

Paragraf ke empat : Menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi

Paragraf ke lima : Menganalisis hubungan antara kepentingan politik dengan kebijakan ekonomi

Paragraf ke 6 : Menguraikan masa berakhirnya pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin

Paragraf ke 7 :

Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.

Serahkan hasilnya kepada guru kalian untuk diperiksa dan dinilai

E. LATIHAN SOAL

- 1 Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi pada Jaman Demokrasi Liberal , Berikut ini adalah berbagai krisis yang mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, **kecuali**
 - A. kondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang cepat.
 - B. perubahan sistem Pemerintahan Presidential menjadi Parlementer
 - C. kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru sebagai ganti UUD' 1950

- D. terjadinya gerakan Separatis di daerah-daerah mengancam keutuhan NKRI
- E. Negara Indonesia dalam keadaan bahaya
2. Pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945. Hal tersebut terjadi ketika
- A. MPRS mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Tap MPRS no III/MPRS/1963
- B. pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu I dibubarkan ketika DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden.
- C. Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara / Ketua MPRS diangkat setingkat menteri
- D. konsep Pancasila yang di dasarkan kepada Ketuhanan YME berubah menjadi NASAKOM
- E. pembentukan MPRS berdasarkan PenPres no 2 tahun 1959.
3. Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri berikut ini :
1. membagi – bagi kekuatan dunia menjadi Nefo dan Oldefo
 2. membentuk poros Jakarta – Peking – Pnompenh – Moscow
 3. menjadi pengagas berdirinya ASEAN
 4. menjadi anggota PBB yang ke 60
 5. konfrontasi dengan Malaysia
- Dari data di atas yang merupakan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia pada masa Orde Lama adalah
- A. 1, 2 dan 5
- B. 2, 3 dan 4
- C. 3, 4 dan 5
- D. 1, 3 dan 4
- E. 1, 3 dan 5
4. Diakhir pemerintahannya, Orde Lama mewariskan tingkat inflasi sebesar 750 % . Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi pada masa ini adalah....
- A. devisa anggaran diatasi dengan pencetakan uang besar-besaran
- B. devisa anggaran diatasi dengan mencari pinjaman luar negeri
- C. terdapat tiga jenis mata uang yang beredar di masyarakat
- D. melemahnya nilai rupiah dan daya beli masyarakat
- E. melemahnya sektor perbankan akibat kredit macet
5. Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami banyak kendala , salah satu kendalanya adalah
- A. kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam pelaksanaan politik mercusuar
- B. masih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan ekonomi
- C. terdapat campur tangan negara-negara komunis dalam penentuan kebijakan ekonomi
- D. terjadinya gerakan-gerakan separatis menyedot banyak dana untuk penanggulangannya
- E. pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

1. Kunci Jawaban : B

Pembahasan

Seorang Presiden berhak mengeluarkan Dekrit , dengan syarat Negara dalam keadaan bahaya. Saat indicator negara dalam keadaan bahaya ketika dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah :

1. Kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD Baru
2. Kondisi politik tidak stabil yang ditandai oleh pergantian kabinet yang cepat
3. Terjadinya Gerakan Gerakan Separatis (Andi Azis, PRRI / Permesta, APRA, DI/ TII, RMS dll)

Hal tersebut mendorong Pemerintah Mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebab ketika Negara Dalam Keadaan Bahaya maka seorang Presiden boleh mengeluarkan Dekrit. Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 berakhirlah Jaman Demokrasi Liberal , selanjutnya Indonesia masuk kedalam Jaman Demokrasi Terpimpin

2. Kunci jawaban : B

Pembahasan

Pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden ketika DPR menolak RAPBN yg diajukan Presiden hal ini bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945 yang mengatur : Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Bukan membubarkan DPR

3 Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Pada masa Demokrasi Terpimpin , pemerintah melakukan penyimpangan terhadap konsep politik Luar Negeri Bebas Aktif diantaranya Membagi dunia jadi dua kekuatan dunia yaitu Nefo dan Oldefa, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, membentuk poros Jakarta - Peking - Pnompehn, Keluar dari PBB

4 Kunci jawaban : A

Pembahasan

Sampai saat ditetapkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 tingkat inflasi membumbung tinggi, sebagai akibat pembangunan yang tidak terarah dan terencana, sehingga mengakibatkan defisit anggaran yang diatasi dengna tinadakan pencetakan uang tanpa kendali . Inflasi mengakibatkan melemahnya nilai rupiah dengan daya beli yang juga rendah

5 Kunci Jawaban : A

Pembahasan

Sebab-sebab Kegagalan Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

- Ketidaktepatan rencana maupun penyimpangan dalam pelaksanaan
- Masalah ekonomi tidak diatasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi tetapi diatasi dengan cara politis
- Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan satu dengan yang lain
- Terjadi berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus

F. Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

NO	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah kamu dapat menjelaskan kebijakan Presiden Soekarno dalam bidang politik tentang Demokrasi Terpimpin?		
2	Apakah kamu dapat menjelaskan tindakan Presiden Soekarno ketika terjadi ketegangan dengan DPR saat diterapkannya Demokrasi Terpimpin		
3	Apakah kamu dapat menceritakan secara singkat Tindakan apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika memperebutkan Irian Barat?		
4	Apakah kamu dapat menceritakan secara singkat Tindakan apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika berseteru dengan Belanda dalam rangka mempertahankan Irian Barat?		
5	Apakah kamu dapat menceritakan dampak positif dan negatif dari diterapkannya Demokrasi Terpimpin?		

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

EVALUASI

1. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah:
 - A. membentuk Dewan Nasional
 - B. membubarkan Dewan Konstituante
 - C. meminta dukungan Angkatan Darat
 - D. membentuk kabinet gotong royong
 - E. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

2. Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap UUD 45, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah:
 - A. pebredekan surat kabar yang menolak ideology Manipol-USDEK
 - B. penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan Negara
 - C. pembubaran DPR hasil Pemilu 1955
 - D. pembatasan kegiatan partai politik
 - E. pembentukan Front Nasional

3. Perhatikan informasi berikut ini :

Dalam menghadapi konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian, Presiden Sukarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora)

 1. memperkuat ketahanan revolusi Indonesia di Irian
 2. gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
 3. meminta dukungan Uni Soviet untuk membebaskan Irian
 4. perjuangan total untuk pembebasan Irian
 5. bersiap untuk mobilisasi umum di Irian
 6. kibarkan sang merah putih di Irian

Berikut ini yang termasuk isi Trikora ditunjukkan oleh nomor ...

 - A. 1), 2) dan 3)
 - B. 1), 3) dan 5)
 - C. 1), 4) dan 5)
 - D. 2), 4) dan 6)
 - E. 2), 5) dan 6)

4. Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan karena:
 - A. DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno
 - B. anggota DPR tidak berasal dari partai politik pendukung
 - C. anggota DPR didominasi oleh kader PKI
 - D. DPR menolak RAPBN tahun 1960
 - E. DPR menolak Ideologi Nasakom

5. Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi terpimpin adalah Revolusi, Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (Resopim). Ajaran tersebut bertujuan:
 - A. memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
 - B. mempertegas arah politik luar negari Indonesia
 - C. menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah
 - D. menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama
 - E. mengkritik Pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) gerakan Benteng

6. Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian barat melalui Sidang Umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan karena:
 - A. pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatic dengan Belanda
 - B. dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat
 - C. masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika
 - D. Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat
 - E. Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda.

7. Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan:
 - A. menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat
 - B. mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat
 - C. mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia
 - D. mengusahakan persenjataan ke Negara-negara blok komunis
 - E. membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat.

8. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia , pemerintah Orde Lama mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi salah satunya adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional (Deppernas) Tugas Deppernas adalah ...
 - A. mempersiapkan rancangan Undang Undang Pembangunan yang berencana
 - B. merumuskan program program ekonomi yang mengarah pada kemandirian
 - C. melaksanakan program program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden Sukarno
 - D. merencanakan program pembangunan jangka Panjang dan jangka pendek
 - E. menyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa

9. Pembangunan proyek proyek Mercusuar pada masa Orde Lama telah menyedot biaya banyak sehingga negara beberapa kali mengalami defisit maka salah satu langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde lama untuk mengatasi kondisi tersebut adalah ...
 - A. mengadakan pemotongan nilai Rupiah menjadi setengahnya (shanering)
 - B. melakukan devaluasi nilai mata uang yaitu mata uang Rp 1000 menjadi Rp 1.
 - C. mengeluarkan mata uang Oeang Republik Indonesia (ORI)
 - D. menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional
 - E. meningkatkan pinjaman luar negeri

10. Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada:
 - A. menurunnya nilai tukar rupiah
 - B. menurunnya tingkat inflasi
 - C. menurunnya pendapatan Negara
 - D. meningkatnya cadangan devisa negara
 - E. meningkatnya utang-utang Negara

KUNCI JAWABAN EVALUASI DAN PEMBAHASAN

1. Kunci Jawaban : A
Pembahasan :
Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957.
2. Kunci Jawaaban : C
Pembahasan :
DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang diajukan pemerinatah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk membubarkan DPR hasilpemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni 1960. Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
3. Kunci jawaban : E
Pembahasan :
Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat (trikora) diyogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora diharapkan agarrakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.
Isi Trikora yaitu:
 1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua Belanda
 2. Kibarkan sang Merah putih di Irian Barat
 3. Tanah Air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mepertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
4. Kunci jawaban : D
DPR menolak rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Penolakkan tersebut mambawa dampak pembubaran DPR pada tanggal 5 maret 1960 oleh Presiden. Presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR GR).
5. Kunci Jawaban : A
Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.
6. Kunci Jawaban : B
Pembahasan :
Indonesia mengajukan masalah Irian barat dalam sidang Umum PBB priode 1954-1957, akan tetapi upaya tersebut gagal karena Indonesia tidak mendapat dukungan dua pertiga anggota sidang
7. Kunci Jawaban : C
Pembahasan :
Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat (trikora) diyogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora diharapkan agarrakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.
8. Kunci Jawaban : A

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional (Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun 1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan.

9. Kunci Jawaban : B

Pembahasan

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional (Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun 1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan.

10. Kunci Jawaban : E

Pembahasan

Pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi presiden no 018 tahun 1964 dan keputusan Presiden No 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi. Akibat dari kebijakan Dana revolusi yaitu:

1. Utang-utang negara semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin menurun
2. Adanya kekacauan dibidang keuangann Negara akibat pemberian fasilitas alokasi kredit kepada perseorangan atau kepada perusahaan yang bukan sektor produksi dengan bunga tertententu.
3. Tingkat inflasi menunjukan kenaikan yang semakin tidak terkendali dimana pada 1959 tingkat inflasi hanya 19,24% meningkat hingga mencapai 635,35% pada 1966.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, Roeslan. 1971. 25 Tahun Indonesia. Djakarta: PT. Gunung Agung

Kemendikbud. 2018. Sejarah Indonesia untuk SMA/SMK Kelas XII. Jakarta: PT. Gramedia

<https://kangone.blogspot.com/2019/02/perkembangan-kehidupan-politik-ekonomi.html>

<http://rusdiaswaj.blogspot.com/2014/04/makalah-sejarah-demokrasi-terpimppin-ma.html>

<https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-kehidupan-indonesia-di-masa-demokrasi-terpimpin>

<https://www.tigaserangkai.com/id/?p=4026>